



20. Estimasi Nilai Perusahaan

Nilai dari investasi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta pada PT (P) KBN diperkirakan sebagai berikut:

Rp (milyar)	2004	2005	2006
Equity	364,5	381,7	407,6
Nilai Investasi Pemerintah	323,5	338,7	361,7

21. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum berlaku di Indonesia seperti PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk standar audit yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, bersama syarat-syarat yang lain.

Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan konsep accrual basis, yaitu harga perolehan, kecuali untuk aktiva tetap yang diperoleh sebelum 28 Juni 1986 dan aktiva tetap yang diperoleh adanya penggabungan disusun berdasarkan nilai kesepakatan antara pemegang saham

Pada tahun 2001 perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi baru mengenai perpajakan yaitu akuntansi pajak tangguhan (*Deffered Tax Assets/Liabilities*) sesuai dengan PSAK No.46. Atas kebijakan ini perusahaan melakukan restated dan reklasifikasi pos-pos neraca dan Laporan Laba (Rugi) untuk tahun berakhir 31 Desember 2000

a. Persediaan

Persediaan berupa alat tulis, BBM, Pelumas, dan suku cadang dinilai berdasarkan harga perolehan, sedangkan pembebanannya dilakukan dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO). Pada tahun 1998 kebijakan akuntansi untuk persediaan ini berubah dengan menggunakan metode fisik untuk pencatatan dan untuk penilaiannya menggunakan harga rata-rata.

b. Aktiva Tetap

Nilai aktiva tetap yang diperoleh setelah tgl 28 Juni 1986 ditetapkan oleh pemegang saham sesuai dengan nilai kesepakatan pada saat likuidasi dari PT Sasana Bandha dan PT BWI. Sedangkan nilai aktiva tetap yang diperoleh setelah tanggal tersebut dinyatakan berdasarkan harga perolehan.

Metode yang digunakan dalam melakukan depresiasi aktiva tetap adalah metode garis lurus (*straight line methode*) sesuai peraturan masalah provisi pajak yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.44/PJ.4/996 diikuti dengan Surat Edaran No.SE-49/PJ.4/996.



c. Penyisihan Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Terhadap piutang yang sulit ditagih dilakukan penyisihan piutang, yang besarnya ditentukan pada analisis masing-masing piutang. Terhadap yang telah disisihkan 100% jika jumlahnya lebih dari Rp2.000.000 akan diserahkan kepada Ditjen PLN untuk proses penagihannya lebih lanjut. Hasil dari Ditjen PLN terhadap piutang yang tidak tertagih akan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk dihapusbukukan. Sedangkan terhadap piutang yang jumlahnya kurang dari Rp2.000.000 langsung dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk dihapusbukukan.

d. Tagihan Biaya Investasi Pihak Ketiga

Biaya untuk penyambungan air bersih, penambahan daya listrik dan biaya konstruksi instalasi listrik, dan telepon akan ditagih kepada investor dan dibukukan pada "Biaya Investasi pihak ketiga". Perkiraan ini menurun secara proporsional untuk penyambungan air bersih, penambahan daya listrik dan penyambungan telepon.

e. Penjabaran Valuta Asing

Transaksi pendapatan dalam valuta asing yang terjadi pada tahun berjalan dibukukan berdasarkan kurs tetap. Kurs tetap tersebut ditetapkan secara bulanan oleh Direksi. Untuk transaksi pembayaran/pelunasan dalam valuta asing dicatat perusahaan kurs tengah BI pada saat transaksi pelaksanaan pembayaran/pelunasan tersebut. Aktiva dan kewajiban moneter pada tanggal neraca dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Selisih kurs yang terjadi pada saat transaksi maupun penjabaran valuta asing tanggal neraca dibukukan dalam pos pendapatan/biaya non operasi tahun berjalan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Pengeluaran

Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui setiap awal bulan setelah diterbitkan nota debet. Sedangkan pengakuan pendapatan jasa AMD (angkutan, Mekanik dan Dokumen) dan PPK (Pergudangan dan Peti Kemas) ditetapkan pada saat pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh PT (P) KBN dan setelah dibuatkan Nota Debet atau faktur tagihannya. Biaya diakui pada saat terjadinya.

g. Penilaian Surat Berharga jangka Pendek

Surat berharga jangka pendek pada setiap akhir buku dinilai dengan harga terendah antara harga perolehan dengan harga pasar yang berlaku dari masing-masing jenis surat berharga.

h. Perpajakan

Beban Pajak dalam penyajian laporan keuangan meliputi beban pajak berjalan dan beban pajak tangguhan. Dalam tahun 2001 Perusahaan telah menerapkan PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Dengan diterapkannya PSAK 46 ini maka terjadi restated dan reklasifikasi pos-pos neraca dan Laporan Laba (Rugi) untuk tahun berakhir 31 Desember 2000.



i. Laporan Arus Kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.

- **Aktivitas Operasi** : Aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- **Aktivitas Investasi** : Perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- **Aktivitas Pendanaan** : Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.

Definisi yang digunakan:

- Kas dan Setara kas berarti mata uang koin & lembaran, saldo giro dan deposito.
- Aktivitas Investasi meliputi pembelian dan penjualan aktiva tetap perusahaan.
- Aktivitas Finansial meliputi perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur pemodalannya. Termasuk di dalamnya adalah penambahan dan pengurangan modal saham, cadangan, dan pembayaran deviden.
- Aktivitas Operasi meliputi seluruh kegiatan dan transaksi di luar kedua aktivitas di atas.

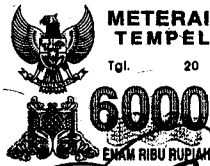


Pengesahan Statement of Corporate Intent :

Jakarta, Februari 2004

Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata
Selaku Kuasa Pemegang Saham
Wakil Negara RI

Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pendayagunaan Kekayaan dan
Usaha Daerah Propinsi DKI Jakarta
Selaku Kuasa Pemegang Saham
Wakil Pemprop DKI Jakarta




Ferdinard Naindoran

Komisaris Utama



Lambock V. Nahattands



Muzahiem Mokhtar

Direktur Utama



Agus Supriyanto